

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI PROYEK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) PERIODE 2007-2008
DI KOTA BIMA**

Tauhid
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Abstract. The purpose of the research in this paper is to describe the implementation of poverty reduction policies through the Urban Poverty Reduction Project (P2KP) 2007-2008 period in Bima City. The type of research used is Descriptive Research with a qualitative approach. The informants were selected by purposive sampling which consisted of the District Facilitator, Sub-district Facilitator, P2KP Secretariat of Bima City, BKM Management, Village Facilitator and the poor who received assistance through the P2KP project and UPK Management. The results of this study show that the implementation stage or implementation of poverty reduction policies through urban poverty reduction projects (P2KP) in Penaraga and Lampe Villages is carried out through several components, namely the community development component, the provision of direct community assistance funds and the provision of package funds in accordance with what is required in the general guidelines for urban poverty reduction projects (P2KP).

Keywords: Policy Implementation, P2KP

Abstrak. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) Periode 2007-2008 di Kota Bima. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih secara *purposive sampling* yang terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Sekretariat P2KP Kota Bima, Pengurus BKM, Fasilitator Kelurahan dan masyarakat miskin yang menerima bantuan melalui proyek P2KP serta Pengurus UPK. Hasil penelitian ini menunjukkan Tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kelurahan Penaraga dan Kelurahan Lampe dilakukan melalui beberapa komponen yaitu komponen pengembangan masyarakat, penyediaan dana bantuan langsung masyarakat dan penyediaan dana paket sesuai dengan yang disyaratkan dalam pedoman umum proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP).

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, P2KP

PENDAHULUAN

Dampak krisis ekonomi yang menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan ekonomi rakyat berupa terganggunya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta kecenderungan bertambahnya penduduk dan rumah tangga miskin, masyarakat tidak berdaya, pengangguran, penurunan pendapatan riil, ketidakpastian, jaminan kesejahteraan serta secara tidak langsung berpotensi sebagai penyebab meningkatnya gejala dan penyakit sosial. Masyarakat miskin pun akan semakin bertambah karena tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, akibat terlilit krisis ekonomi karena proses pembangunan tidak berjalan dengan stabil dan roda ekonomi atau aktivitas ekonomi masyarakat pun lumpuh, sehingga akan menambah duka Masyarakat yang berkepanjangan. Masyarakat tidak mampu lagi untuk bertahan dan hanya mengharapkan belas kasihan dari negara melalui proyek-proyek pembangunan yang bisa menyambung hidup. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Awan Setya Dewanta (1995:9) bahwa kemiskinan juga merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar. Sedangkan kesenjangan merupakan ketidak merataan akses terhadap sumber ekonomi yang dimiliki. Memang kemiskinan itu sangat erat dengan kesenjangan ekonomi, karena kesenjangan yang terjadi antar lapisan penduduk dalam suatu masyarakat pada hakekatnya bersumber dari masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata melainkan masalah yang cukup luas yang mencakup masalah sosial, budaya dan politik, sehingga perlu untuk penanggulangannya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang masih banyak menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomi, seperti tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan daerah yang kecil, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan juga rendahnya perkembangan diberbagai sektor kegiatan terutama pendidikan dan kesehatan (Statistik Indonesia, 2000). Jumlah penduduk miskin di NTB termasuk tinggi sekitar 32,96%, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia rata-rata 23,43%. Sedangkan menurut data BKKBN Tahun 2002 bahwa sebanyak 35,74% keluarga di NTB termasuk pada kategori pra sejahtera (sangat miskin), keluarga Sejahtera I sebanyak 40% dan sisanya masuk dalam kategori keluarga sejahtera II dan III. Rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga tersebut, antara lain karena besarnya

jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga, rata-rata jumlah jiwa setiap keluarga di NTB berkisar antara 5-6 jiwa setiap rumah tangga dan usia rata-rata menikah tergolong mudah yaitu 15-20 tahun. Kemudian terkait dengan kualitas penduduk usia kerja berdasarkan hasil Susenas tahun 2000, dilihat dari tingkat pendidikan masih sangat rendah, sebagian besar (lebih dari 60%) berada pada level pendidikan Sekolah Dasar kebawah hingga tidak pernah sekolah (buta huruf) dan hanya kurang dari 3% yang mengenyam pendidikan tinggi. Lebih lanjut terkait dengan problem kesehatan, yaitu masih terbatasnya pelayanan kesehatan memadai, tingginya angka kematian bayi, terbatasnya sumber air bersih dan buruknya sanitasi di beberapa lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan. (WHO, 2002).

Keadaan masyarakat miskin di Kota Bima sampai tahun 2008 sebanyak 9.673 orang dari jumlah rumah tangga sebanyak 30.779 orang. Jumlah rumah tangga miskin tersebut terbagi dalam rumah tangga miskin tahap I sebanyak 8.429 orang dan tahap II sebanyak 1.244 jiwa. Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur yang merupakan lokasi P2KP dari lima kecamatan yang ada di Kota Bima yang dijadikan obyek penelitian dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan P2KP hanya meliputi dua kelurahan yaitu Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba dan Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur. Kelurahan Penaraga yang ada di Kecamatan Raba sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan ciri kehidupan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Pola dan kebiasaan hidup sebagian masyarakatnya juga masih tergolong tradisional, meski sebagian yang telah berpendidikan mulai mengembangkan pola kehidupan modern. Kelurahan ini berada di Jantung Kota Bima terus mengalami pergeseran nilai sesuai dengan dinamika perubahan kota yang diiringi dengan perubahan perilaku kehidupan yang lebih modern.

Sementara itu Kelurahan Lampe yang berada di Kecamatan Rasanae Timur sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sektor pertanian dan kehutanan. Kelurahan ini berada ujung timur Kota Bima dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima jauh mengalami ketertinggalan perkembangan kehidupan masyarakat kota lain yang lebih maju dan modern seiring dengan perubahan kota. Semakin padatnya penduduk tidak diiringi dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka sebagian besar masyarakat masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi seperti ini merupakan suatu tantangan kedepan bagi kelurahan ini untuk menuntut masyarakat lebih

kreatif dalam menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan jauh dari keterpurukan ekonomi.

Menyadari akan hal itu, maka program P2KP di gulirkan di Kota Bima untuk merespon permasalahan yang ada, seperti Kelurahan Penaraga dan Kelurahan Lampe. Dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Bima khususnya di Kelurahan Penaraga dan Kelurahan Lampe untuk ikut berperan serta dalam program tersebut yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama dalam peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Dan disadari sepenuhnya bahwa P2KP ini dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian P2KP menjadi harapan bagi pengembangan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable community development*). Pengembangan masyarakat ini tentunya ditujukan lebih pada bagaimana masyarakat berperan secara aktif meningkatkan partisipasi mereka dalam menanggulangi kemiskinan di lingkungannya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Berkaitan dengan definisi Kebijakan Publik, terdapat banyak batasan dan definisi yang bisa didapatkan dari literatur-literatur ilmu politik maupun administrasi. Namun banyaknya pendapat tersebut tidaklah berarti telah memberikan makna yang simpang siur atau pertentangan persepsi tentang Kebijakan Publik. Perbedaan justru terjadi hanya pada kedalaman analisis di dalam merumuskan batasan-batasan Kebijakan Publik itu sendiri. Kendati pada kenyataannya bahwa definisi atau batasan sedemikian banyaknya, namun untuk keperluan analisis di dalam tulisan ini akan dikemukakan berapa saja dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, diantaranya adalah Robert Eyestone seperti yang dikutip oleh Winarno (1989) yang berpendapat bahwa secara luas Kebijakan Publik itu dapat didefinisikan sebagai berikut : *Public Policy is the relationship of a governments unit to its Environment* (Kebijakan Publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya). Konsep ini memiliki kelemahan karena mengandung pengertian yang demikian luasnya dan sangat tidak kongkrit karena tidak memuat secara spesifik bagaimana hubungan yang dimaksud. Batasan lain tentang Kebijakan Publik ini diberikan secara simpel oleh Thomas R. Dye seperti yang dikutip oleh Winarno, (1989) yang mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai

berikut : *Public Policy is whatever governments chose to do or not to do* (Kebijakan Publik adalah apa saja yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Sekalipun batasan ini dirasakan agak tepat, akan tetapi batasan ini tidak cukup mengakui bahwa mungkin terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada Kebijakan Publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan yang oleh David Easton seperti yang dikutip oleh Wahab, (2002) disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dalam sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab berkaitan dengan keputusan atau Kebijakan Publik tertentu. Berkaitan dengan pendapat Easton di atas, Solichin A. Wahab di dalam bukunya

Analisis Kebijaksanaan (2002) mengemukakan beberapa ciri dari Kebijakan Publik sebagai berikut : *Pertama*, Kebijakan Publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba kebetulan, artinya bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan. *Kedua*, Kebijakan Publik pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh Pejabat-Pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya saja kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang di dalam bidang-bidang tertentu melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan atau pemaksaan pemberlakuannya. *Ketiga*, Kebijakan Publik bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh Pemerintah di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di dalam mengatur pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di dalam kerangka Otonomi Daerah, industri dan perdagangan, mengendalikan inflasi, dan lain sebagainya. *Keempat*, Kebijakan Publik mungkin berbentuk positif dan mungkin pula berbentuk negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh tertentu. Sementara di dalam

bentuknya yang negatif, kebijakan publik meliputi keputusan-keputusan Pejabat Pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru sebenarnya sangat diperlukan.

Pengertian Kemiskinan

Dalam dunia teoritis, ada berbagai macam pengertian dan pendefinisian tentang kemiskinan. Berbagai macam pengertian ini membawa kepada aplikasi dan kebijakan yang berada didalam menanggulangi problema kemiskinan. Beberapa sarjana pun berbeda-beda dalam mengkonsepsikan makna kemiskinan tersebut. Menurut Bradley R. Schiller, seperti yang dikutip oleh ala, (1981) kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, yang antara lain kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan elementer, dan lain-lain.

John Friedmann (1992), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) : modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lain-lain), sumber-sumber keuangan (income kredit dan yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi dan lain-lainnya), network atau jaringan, sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang- barang, dan lain-lain, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengaruh pengangguran, keterbelakangan dan ketimpangan serta lemahnya kemampuan berusaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. Hal ini dapat tercermin apabila diukur dengan tingkat pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kartasasmita (1993:50), mengatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak dapat dihindari dengan kekuatanyang ada pada dirinya, kemiskinan

antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang akan tidak dapat diubah, sehingga kemiskinan akan tumbuh sebagai benih yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Konsep P2KP

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar nantinya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. Untuk mewujudkan tujuan secara maksimal, diperlukan adanya keterlibatan berbagai pihak yang diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah merupakan salah satu pihak yang dimaksud. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. [Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005].

Pengertian P2KP berdasarkan Buku Pedoman Teknis P2KP (2002) yaitu merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun "gerakan bersama" dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan. Dibandingkan program kemiskinan yang lain, P2KP adalah program kemiskinan yang pertama yang berorientasi *recovery* atau pemulihan. Dalam pelaksanaannya terkandung maksud proses pemberdayaan masyarakat, yaitu mengupayakan agar masyarakat dapat menentukan dan mengatur dirinya sendiri. Dengan kata lain masyarakat diharapkan menjadi subjek bagi dirinya.

Pengertian masyarakat dalam P2KP adalah seluruh penduduk wargakelurahan atau desa peserta, baik yang kaya maupun yang miskin, kaum minoritas, pendatang dan penduduk asli setempat, yang serelah melalui proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi kelurahan/desa mereka serta persoalan kemiskinan yang masih

dihadapi dan sepaka perlunya mengorganisasikan diri untuk menaggulangi persoalan kemiskinan tersebut secara bersama, mandiri, terpadu dan sistematis. Menurut P2KP Permasalahankemiskinan di Indonesia sudah sangatmendesak untuk ditangani.

Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta matapencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baikdimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala atau untuk mendapat gambaran ciri-ciri individu atau kelompok. Lokasi yang dijadikan penelitian dalam penulisan ini adalah Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba dan Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Tahap Persiapan Dan Sosialisasi

Hogwood dan Gunn seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab (2006:60) mengemukakan bahwa unsur pokok dalam kebijakan adalah implementasi suatu program. Dengan demikian maksudnya adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dengan jelas batas-batasnya mencakup serangkaian kegiatan pengesahan/legalisasi program penanggulangan kemiskinan, pada dasarnya merupakan agenda panjang yang harus dilaksanakan secara intensif dan terus menerus/berkelanjutan. Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan termasuk dalam kategori *redistributive policy*, yaitu kebijakan yang dengan sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan atau Hak-hak di antar kelas-kelas dan kelompok penduduk.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Fasilitator Kelurahan Lampe bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan proyek P2KP di Kelurahan Lampe tingkat partisipasi

masyarakat untuk menghadiri sosialisasi proyek ini di Kantor Kelurahan Lampe rendah sekali. Ini menandakan bahwa responsif masyarakat terhadap berbagai program pemerintah termasuk program penanggulangan kemiskinan sangat rendah. Walaupun partisipasi masyarakat dalam mendukung proyek ini, maka Fasilitator Kelurahan dan Koordinator BKM dan anggotanyaterus melakukan upaya yang intens dan terus menerus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat miskin pendekatannya secara "*Personal Approach*", pendekatan secara perseorangan untuk membangun kebersamaan dan keswadayaan mereka dalam mendukung dan menyukseskan proyek ini, terutama mereka yang betul sebagai sasaran penerima bantuan proyek ini.

Oleh karena itu masyarakat sebagai subyek pembangunan maka dia harus ikut berperan serta dalam tiap usaha dan kegiatan pembangunan. Sedangkan kedudukannya sebagai obyek pembangunan, maka dia juga harus ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut. Proses pembangunan sebenarnya tergantung pada perkembangan situasi dan kebutuhan kondisi masyarakat, selain jenis program dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakannya. Partisipasi masyarakat atau rakyat dalam berbagai program pembangunan dianggap penting, sebagaimana dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1987:99) sebagai berikut :

"*Pertama*, rakyat adalah focus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut; *kedua*, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; *ketiga*, partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaanya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan; *keempat* pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; *kelima*, partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; *keenam*, ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; *ketujuh* Partisipasi menopang pembangunan; *kedelapan*, partisipasi menyediakan lingkungan kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; *kesembilan*, partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khusus daerah; dan terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai

pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri". (Tjokrowinoto, 1987:99).

Lebih lanjut M. Tajadi Amar (1983:32), mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam segenap proses kegiatan pembangunan meliputi proses pengambilan keputusan atau perencanaan program, proses pelaksanaan pembangunan dan merangsang resiko dari pembangunan tersebut". Berkaitan dengan pendapat tersebut mengisyaratkan betapa besarnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, apalagi proyek yang terkait langsung dalam merubah kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik seperti penataan gang, drainase sebagai wujud lingkungan yang sehat.

Tujuan Proyek P2KP

Mengingat bahwa proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) adalah landasan dan pemicu tumbuhnya sinergi gerakan kemitraan dalam program penanggulangan kemiskinan di perkotaan memiliki tujuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum P2KP (2004:20) bahwa tujuan dari pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan di setiap kelurahan yang ada di perkotaan yang terkena proyek ini adalah :

1. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat (organisasi masyarakat warga); dan
3. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat miskin memiliki dua makna pokok yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat mencapai tingkat kemajuan yang diharapkan; dan meningkatkan kemandirian masyarakat dengan pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Konsekuensinya, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai

upaya peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat memiliki dan makna pokok yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi masyarakat mencapai tingkat kemajuan yang diharapkan; dan meningkatkan kemandirian masyarakat dengan pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sasaran Proyek P2KP.

1. Masyarakat

Kelompok sasaran penerima manfaat P2KP adalah warga masyarakat miskin perkotaan sesuai dengan rumusan criteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, termasuk didalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi serta kehilangan sumber nafkahnya karena krisis ekonomi dan lain- lain.

2. Pemerintah daerah (Dinas) bersama kelembagaan masyarakat kelurahan

Pemerintah Kota Bima yang terpilih sebagai peserta melalui dinas terkait dalam hal Kimpraswil Kota Bima bersama BKM Kelurahan Penaraga dan Kelurahan Lampe merupakan sasaran penerima manfaat komponen bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP.

3. Proses penetapan lokasi sasaran Lokasi sasaran P2KP di Kota

Bima sebanyak 29 kelurahan. Penetapan lokasi sasaran program ini adalah kelurahan yang memiliki masyarakat miskin cukup banyak dan kondisi kelurahan masih kelihatan kumuh, sehingga sangat penting untuk mendapatkan bantuan melalui program ini.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Proyek P2KP akan melakukan monitoring lapangan secara ekstensif. Untuk itu Konsultan Manajemen Pusat (KMP) menyusun suatu program monitoring proyek secara rutin dan setiap BKM akan dikunjungi sekurang- kurangnya dua kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran P2KP di masing-masing kelurahan termasuk Kelurahan penaraga dan kelurahan lampe.

Transparansi disini semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dana bantuan P2KP akan dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat kelurahan serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, bulletin dan berbagai media yang dimungkinkan. Notulensi pertemuan, kebijakan, kondisi dan laporan keuangan bulanan BKM, nama serta jumlah pinjaman, jenis kegiatan yang diusulkan, penunggak pinjaman dan lain-lain harus disebarluaskan ke masyarakat serta harus ditempelkan di papan-papan pengumuman seluruh seluruh pelosok kelurahan, khususnya ditempat-tempat strtegi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Koordinator BKM Kelurahan Penaraga bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan proyek P2KP di Kelurahan ini kadang dilakukan oleh masyarakat, Fasilitator Kelurahan, Koordinator P2KP Kota Bima, Konsultan Manajemen Wilayah. Maksudnya bahwa pelaksanaan proyek ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga hal yang sekecil apapun dari pelaksanaannya tidak ada yang ditutupi. Jadi masyarakat punya hak untuk menuntut segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan bantuan P2KP oleh UPK/BKM. Serta sebaliknya UPK/BKM dan KSM serta penerima manfaat didorong pula untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat serta pihak terkait lainnya yang ingin mengetahui informasi dana serta kegiatan P2KP.

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implmentasi kebijakan termasuk impelementasi penanggulangan kemiskinan melalui proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Menurut AG Subarsono (2006:113) Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang dimplementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Lebih lanjut AG Subarsono (2006:114) monitoring atau pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dimplementasikan dengan tujuan menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran,

menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besardan melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa KSM baik yang ada di kelurahan Penaraga maupun Kelurahan Lampe bahwa hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Koordinator P2KP Kota Bima dan Fasilitator Kelurahan sangat membantu bagi kami dalam melaksanakan proyek ini, sebab banyak persoalan terutama pada penyusunan proposal usulan kegiatan, penyisian dokumen atau pelaksanaan proyek ini termasuk menyusun laporan keuangan kelompok. Artinya bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien berdaya guna dan berhasil gunaemudian hasil wawancara peneliti dengan Koordinator P2KP Kota Bima dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan proyek P2KP untuk Kelurahan Penaraga dianggap yang terbaik dan sukses baik untuk kegiatan lingkungan, sosial maupun ekonomi.

Sementara itu Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur yang terjelek dan dianggap gagal dari pelaksanaan proyek P2KP baik itu lingkungan fisik maupun sosial dan ekonomi. Padahal tidak sedikit anggaran yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini. Kegagalan ini lebih disebabkan tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara koordinator BKM dengan anggotanya, maupu dengan KSM-KSM yang ada maupun tugas dankewajiban-kewajiban yang memadaidalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur yang terjelek dan dianggap gagal dari pelaksanaan proyek P2KP baik itu lingkungan fisik maupun sosial dan ekonomi. Padahal tidak sedikit anggaran yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini. Kegagalan ini lebih disebabkan tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara koordinator BKM dengan anggotanya, maupu dengan KSM-KSM yang ada maupun tidak transparansa penggunaananggaran yang bertentangan dengan ketentuan proyek P2KP ini. Ini berarti pelaksanaan proyek P2KP di Kelurahan Lampe dianggap gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain : teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut; Sarana

yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; Sarana itu mungkin tindakan atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar; Ketidakpastian faktor intern dan faktor ekstern; Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang; dan Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-Sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Penentuan stakeholders yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Dalam penentuan stakeholders atau aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) melalui kegiatan rembug masyarakat, dimana berbagai elemen dilibatkan baik dari Pemerintah daerah (Kimpraswil dan Bappeda), masyarakat melalui BKM dan pihak swasta (para LSM yang peduli terhadap upaya Penanggulangan kemiskinan masyarakat), dan difasilitasi oleh fasilitator Kelurahan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Fasilitator Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba bahwa penentuan pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan mereka-mereka yang mengetahui persis dan terlibat langsung didalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Penaraga, mereka diundang di kantor Kelurahan untuk bermusyawarah dan melakukan rembug warga terkait dengan pelaksanaan P2KP di Kelurahan ini. Langkah ini dilakukan oleh pihak BKM Kelurahan Penaraga bahwa proyek P2KP ini harus transparan, akuntabel dan terbuka makanya melibatkan semua unsur yang ada di kelurahan penaraga baik pada saat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan proyek bahkan monitoring dan evaluasi, sehingga hasil dari proyek ini bisa dinikmati oleh masyarakat miskin maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu dari hasil wawancara peneliti dengan Fasilitator Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur bahwa penentuan pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan oleh Koordinator BKM biasanya ditunjuk langsung yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat tanpa melalui rembug masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini, sehingga kualitas orang belum tentu bisa diukur hanya berdasarkan kemauan Koordinator BKM dan pihak Kelurahan. Pada hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam proyek P2KP ini. Maksudnya supaya proyek ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan selesai tepat waktu maka proses penentuan stakeholders dilakukan seperti itu walaupun bertentangan dengan ketentuan

P2KP.

Kadang kegiatan peran masyarakat dalam implementasi kebijakan publik atau pelaksanaan pembangunan daerah seringkali hanya sebatas pelibatan dalam memberi masukan saja. Sifatnya hanya pasif dan cenderung sebagai pelengkap saja. Pendekatan konvensional dalam implementasi kebijakan publik cenderung memandang masyarakat sebagai obyek fungsional pembangunan. Keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan lebih-lebih dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting sekali dan dibutuhkan. Pemerintah (state) selaku institusi kekuasaan dalam proses pengambilan kebijakan melalui instrumen-instrumen kekuasaan seperti keputusan-keputusan, peraturan maupun pedoman-pedoman umum (P2KP), pihak swasta/dunia usaha cenderung sebagai pihak yang mendominasi dalam bentuk usaha cenderung sebagai pihak yang mendominasi dalam bentuk swadaya dan masyarakat diwakili oleh kelompok kepentingan seperti BKM/KSM yang ada di setiap kelurahan yang menjadi sasaran proyek P2KP.

Peran stakeholders yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Desentralisasi telah mendorong dan menggairahkan daerah-daerah untuk melakukan konsolidasi ataupun pembaharuan dalam proses, produk, koordinasi, organisasi dan manajemen pembangunan daerah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat dalam implementasi pembaharuan di daerah merupakan "*best practises*" dan "*lessons learned*" bagi pengembangan prinsip-prinsip Dasar bagi penyempurnaan sistem pembangunan daerah secara nasional. Hasil-hasil studi tentang pembangunan, Korten (1984) menyatakan program pembangunan tidak mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, bahkan gagal mencapai tujuan tersebut. Seeres (1991) telah lama pula mengungkapkan akan hal tersebut, yaitu dengan pernyataannya bahwa proses pembangunan akan bermakna bila proses pembangunan itu mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan berbagai ketimpangan.

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi, menurut SMERU seperti yang dikutip oleh Soeharto (2004:7-8) menyatakan dimensi tersebut sebagai berikut:

1. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang

dan papan);

2. ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
3. ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
4. kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal;
5. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam;
6. ketidaklibatan dalam kegiatan sosial masyarakat;
7. ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
8. ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan
9. ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah program yang menginisiasi masyarakat agar dapat berkarya secara efektif, evaluatif, kreatif dan inovatif. Program pembangunan ini ditujukan untuk

memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat miskin untuk lebih berdaya dengan dibukanya akses ekonomi terutama akses pemasaran terutama program yang memprioritaskan pembangunan prasarana desa. Hasil temuan peneliti terdahulu sepakat bahwa partisipasi masyarakat dapat terbentuk melalui program tersebut walaupun ada sebagian masyarakat yang masih terikat oleh nuansa adat dan agama setempat, tetapi paling tidak program tersebut merupakan langkah awal bagi masyarakat untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan di desa dengan tujuan agar terjadi proses pemberdayaan di tengah masyarakat.

Guna mengentaskan masyarakat dari kungkungan kemiskinan diperlukan adanya kebijakan, komitmen dan program serta pendekatan yang tepat. Disamping itu diperlukan juga suara sikap dan tindakan yang memperlakukan orang miskin sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek. Masyarakat miskin bukanlah masyarakat yang tidak memiliki apapun, melainkan memiliki sesuatu walaupun terbatas.

Berbagai strategi pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan telah dilakukan

seperti model strategi kebutuhan pokok, program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan (P4K) dari Departemen Pertanian, Proyek Nusa Tenggara Agricultural Area Development (NTAADP), Kompensasi BBM melalui Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Beras Miskin (Raskin), dan aneka macam strategi lainnya. Meskipun program tersebut telah dilaksanakan dan telah menurunkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan, namun kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin belum bisa di atasi sepenuhnya dan bahkan kesenjangan tersebut masih melebar dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kesenjangan antara kelas social baik dalam ketidakmerataan pembagian hasil, dari segi pendidikan, pekerjaan maupun usaha. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran terutama sumber daya daerah yang tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Untuk penerapan program-program tersebut disediakan modal kerja bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan dirinya. Dengan tersedianya modal, penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

Peranan masyarakat dalam proses penanggulangan kemiskinan cukup penting sebab masyarakat merupakan roda penggerak utama kegiatan pembangunan di setiap wilayah, untuk itu peranan masyarakat harus ditunjang dengan program pemerintah yang dapat meningkatkan kinerja masyarakat dalam meningkatkan segala kegiatan yang dapat menunjang pemasukan daerah dan pemerintah harus berusaha mendampingi, membimbing masyarakat dengan melakukan pelatihan, penyuluhan atau

pemberdayaan manusia. Bagaimana sebenarnya pelibatan stakeholders dalam proses penanggulangan kemiskinan melalui proyek P2KP di Kota Bima, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator P2KP Kota Bima diruang kerjanya pada tanggal 1 Juli 2009 , menjelaskan : bahwa pelibatan para LSM dan dunia swasta dan juga Kelompok swadya Masyarakat (KSM) dan BKM serta Pemerintah daerah dalam proses penanggulangan kemiskinan di setiap kelurahan selalu dilibatkan dalam rangka mencari formula yang tepat dalam rangka menanggulangi kemiskinan masyarakat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat, sehingga masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dalam pelaksanaan pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kota Bima, khususnya pada dua kelurahan lokasi

penelitian yaitu Kelurahan Penaraga dan Kelurahan Lampe melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap monitoring dan evaluasi. *Pertama* ; Tahap persiapan dan sosialisasi merupakan salah satu tahap penting dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan, karena proses ini merupakan landasan awal bagi kesuksesan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kegiatan sosialisasi penanggulangan kemiskinan melalui proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan di Kelurahan Lampe melalui lokakarya di aula kantor kelurahan tingkat partisipasi masyarakat untuk menghadiri sosialisasi proyek P2KP sangat rendah tidak sebanding jumlah yang diundang dengan yang menghadiri acara tersebut. Sementara itu tahap persiapan dan kegiatan sosialisasi proyek P2KP di Kelurahan Penaraga dengan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi hal itu terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri pertemuan sosialisasi proyek P2KP di Kantor Kelurahan Penaraga. *Kedua*; Kelurahan Lampe kurang memberikan hasil yang kurang memuaskan, dimana para pelaksana proyek ini ditingkat lapangan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan baik fisik (KSM Lingkungan), Ekonomi (KSM Ekonomi) dan Sosial (KSM Sosial).

2. Pelibatan stakeholders dalam implementasi kebijakan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) baik di Kelurahan Penaraga maupun kelurahan Lampe. *Pertama*; Penentuan stakeholders yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan proyek penanggulanga kemiskinan perkotaan (P2KP) dari data fokus menggambarkan bahwa ada perbedaan dalam penentuan stakeholder dalam proses implementasi kebijakan tersebut di Kelurahan Penaraga mereka diundang di kantor Kelurahan untuk bermusyawarah dan melalukan rebug warga terkait dengan pelaksanaan P2KP di Kelurahan ini. Sementara di Kelurahan Lampe Penentuan stakeholders yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) ditunjuk langsung yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat oleh BKM dan pihak kelurahan, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Dan *kedua*; Sementara itu pelibatan para LSM dan dunia swasta dan juga Kelompok swadya Masyarakat (KSM) dan BKM serta Pemerintah daerah dalam proses

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990; *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001; *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, LPFE UI Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1986; *Ekonomi Pembangunan*, SDIE YKPN, Yogyakarta.
- Asmarani, Dyah Lestari, 2001; *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan : Kajian Terhadap Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Pasanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu*, Tesis Universitas Brawijaya, Malang.
- Awan Setya Dewanta, 1995; *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT.Tiara Wacana Yogya
- Bappenas 2004; *Program Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik Perwakilan Bima Tahun 2006.
- Islamy, M. Irfan, 1988; *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Ismawan, 1996; *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius Yogyakarta
- Kota Bima Dalam Angka Tahun 2007. Moleong, Lexy J, 2005; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustajab, 2000; *Implementasi Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) sebagai Pemberdayaan Masyarakat*, Tesis Universitas Brawijaya Malang.
- Pamungkas, Sri Bintang, 1996; *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia Suatu Evaluasi Atas Kebijakan Pembangunan*, Rineka Cipta
- Panduan Umum Program IDT Tahun 2003.
- Parsudi Suparlan, 1995; *Kemiskinan Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pedoman Umum P2KP, 2004; *Bersama Membangun Kemandirian*, Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
- Soeharto, 2004; *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktek Mengkaji Masalah dan*

Kebijakan Sosial, AlfabetaBandung.

Soemardjan, Selo, 1990; *PengantarSosiologi*, UI Press Jakarta.

Soetrisno, L, 1996; *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius Yogyakarta.

Sondang P. Siagian, 1983; *Analisa Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategis Organisasi*, Gunung Agung Jakarta.

Statistik Indonesia 2000, Biro PusatStatistik Jakarta.

Sumodihardjo, 1993, *PembangunanDaerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Sunyoto, 1995; *Elite Dalam Perspektif Sosiologi*, Fisip UGM, Yogyakarta.

Soekamto, Hadi, dkk, 2004; *PartisipasiMasyarakatDalamPenanggulangan Kemiskinan*.
Jurnal Ilmiah AdministrasiPublik FIA, Malang.

Winarno, Budi, 1989; *Teori dan ProsesKebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta.

Wiranto, Tatang, 2001 ; *Teori Kebijakanaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi SosialUGM, Yogyakarta.